

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban atas kinerja manajemen dalam suatu periode yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan pada umumnya berfokus pada informasi laba yang ada pada laporan keuangan. Juanda (2007) mengungkapkan informasi laba berfungsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, memberikan estimasi daya melaba jangka panjang, memprediksi laba pada masa yang akan datang, dan memprediksi risiko investasi atau pinjaman kepada perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan prinsip akuntansi sebagai pengontrol bahwa angka-angka di setiap pos laporan keuangan sudah disajikan secara tepat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada perusahaan dalam menentukan metode dan estimasi akuntansi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga perusahaan dapat memilih metode yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang dialami perusahaan (Ramadhani & Sulistyowati, 2019). Manajemen perusahaan dapat leluasa memilih pelaporan keuangan yang konservatif maupun optimis. Namun dalam praktiknya, kebebasan pemilihan metode akuntansi ini seringkali disalahgunakan manajemen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan, seperti memanipulasi angka pada laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Ramadhani & Sulistyowati, 2019). Adanya manipulasi laporan keuangan tersebut akan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus lebih berhati-hati dalam memilih prinsip akuntansi

Riska Mardiani Putri, 2022

*PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang digunakan karena diharapkan perusahaan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan tidak menyesatkan penggunaannya.

Prinsip yang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menghadapi keadaan ekonomi dan aktivitas perusahaan yang tidak pasti adalah prinsip kehati-hatian atau seringkali disebut dengan prinsip konservatisme. Watts (2003a) mengungkapkan konservatisme merupakan prinsip dalam pelaporan keuangan dimana tidak terburu-buru dalam mengakui laba dan aktiva serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mungkin akan terjadi. Secara sederhana prinsip ini menunda pengakuan pendapatan, mengakui kerugian lebih cepat, menilai aktiva lebih rendah, dan mengakui kewajiban lebih tinggi. Prinsip konservatisme lebih mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian dimasa yang akan datang dan tidak mengantisipasi kemungkinan laba yang mungkin diperoleh meskipun kemungkinan terjadinya lebih besar.

Pengukuran laba dan aktiva perusahaan dengan prinsip konservatisme menjadi hal yang penting karena pada masa pandemi covid-19 perusahaan cenderung berada pada keadaan ekonomi dan aktivitas bisnis yang tidak pasti. Manajer cenderung dituntut untuk membuat keputusan yang lebih hati-hati di tengah ketidakpastian (Utthavi & Sumiari, 2021). Lebih lanjut *Center of Accounting Studies UNPAD* berpendapat bahwa laporan keuangan yang disajikan pada masa ketidakpastian akibat pandemi covid-19 harus menggambarkan ketidakpastian tersebut dalam penyajian laporan keuangannya sehingga manajemen tidak dapat melakukan manajemen laba dan menyajikan laporan yang tidak tepat. Selain itu, dengan penerapan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan perilaku manajer yang oportunistik seperti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan membesar-besarkan (*overstated*) dalam menyajikan laba dan aktiva perusahaan (LaFond & Watss, 2008).

Sejalan dengan pengadopsian *International Financial Reporting Standards (IFRS)* di Indonesia yang resmi digunakan sejak tahun 2012, prinsip konservatisme digantikan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*). Sinambela & Almilia (2018) mengungkapkan perbedaan mendasar antara prinsip konservatisme dan *prudence*

adalah pada pengakuan pendapatan. Dalam prinsip konservatisme pendapatan akan diakui apabila benar-benar telah terealisasi, sedangkan kerugian akan segera diakui walaupun belum terealisasi. Sementara dalam prinsip *prudence* pendapatan dapat segera diakui walaupun belum terealisasi apabila kriteria dalam pengakuan pendapatan tersebut sudah terpenuhi. Dengan demikian, prinsip konservatisme akuntansi tidak hilang dalam IFRS hanya karena tidak ditekankan dalam standar, dengan adanya ketidakpastian yang akan perusahaan hadapi maka penerapan prinsip konservatisme akuntansi akan tetap ada dalam penyajian laporan keuangan (Juanda, 2012).

Prinsip konservatisme akuntansi masih dianggap prinsip yang kontroversial. Sulastri & Anna (2018) berpendapat bahwa penggunaan prinsip konservatisme dapat menghasilkan laporan keuangan yang cenderung bias sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi risiko perusahaan karena pada dasarnya laporan keuangan disusun dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Sebagai pihak yang mendukung konservatisme, Watts (2003a) berpendapat bahwa prinsip konservatisme dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak. Selain itu, penerapan prinsip konservatisme juga dapat mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan dan mengurangi biaya agensi (LaFond & Watts, 2008).

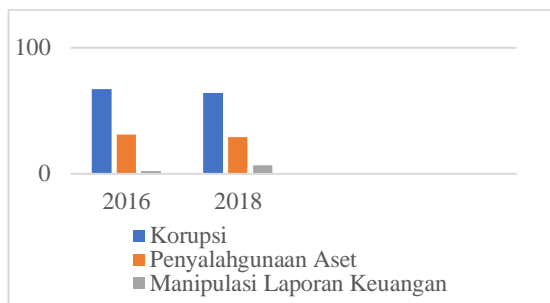
Banyaknya kasus kecurangan di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan rendahnya tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan (Wardhani, 2008). Berdasarkan survei dan penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia tahun 2019, *fraud* laporan keuangan termasuk ke dalam jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. ACFE mendefinisikan *fraud* laporan keuangan merupakan tindakan manipulasi atau kesalahan yang dibuat oleh seseorang, manajer atau entitas yang mengetahui bahwa kesalahan tersebut dapat mengakibatkan manfaat yang buruk kepada penggunaan laporan keuangan, individu, entitas, maupun pihak lain.

Riska Mardiani Putri, 2022

**PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

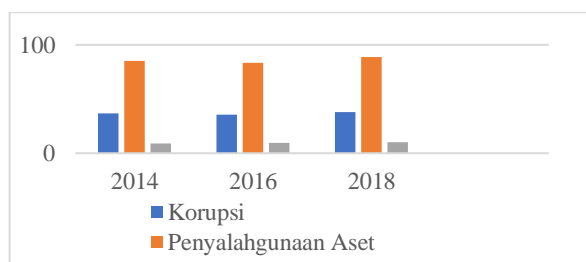
**Grafik 1.1**  
**Kasus Kecurangan di Indonesia**



Sumber: ACFE Indonesia, 2019 (data diolah)

Penelitian yang dilakukan ACFE Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa kasus manipulasi laporan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, kasus manipulasi laporan keuangan sebesar 2% dari 221 kasus kemudian meningkat menjadi 6,7% dari 239 kasus. Selain perusahaan dalam negeri, hasil survei ACFE tahun 2018 di dunia juga menunjukkan bahwa kasus *fraud* terhadap laporan keuangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 kasus manipulasi laporan keuangan sebesar 9% dari 1.483 kasus, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 9,6% dari 2.410 kasus, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 10% dari 2.690 kasus. Meskipun kenaikan angka kasus manipulasi laporan keuangan tidak signifikan, namun kenaikan ini mengindikasikan semakin banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia maupun dunia.

**Grafik 1.2**  
**Kasus Kecurangan di Dunia**



Sumber: ACFE, 2018 (data diolah)

Salah satu contoh kasus kecurangan manajemen berupa manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan sikap tidak konservatif adalah pada perusahaan BUMN yaitu kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Hartomo (2019) dalam artikelnya pada Juni 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia Tbk. mencatat laba bersih sebesar USD 809,84 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat) dimana angka tersebut melonjak naik dari tahun 2017 yang mencatat kerugian USD 216,5 juta. Kenaikan laba secara drastis terjadi karena PT Garuda Indonesia Tbk. mencatatkan piutang dari PT Mahata Aero Teknologi terkait kerja sama penyediaan layanan *wifi on board* sebagai pendapatan. PT Garuda Indonesia Tbk. belum mendapatkan bayaran dari PT Mahata Aero Teknologi atas kerja sama yang dilakukan, namun manajemen sudah mengakuinya sebagai pendapatan. Hal tersebut menuai polemik sehingga PT Garuda Indonesia Tbk. dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sikap optimisme manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, yang tidak berhati-hati dalam mengakui pendapatan yang seharusnya tidak diakui mengindikasikan rendahnya penerapan konservatisme akuntansi sehingga menyebabkan laporan keuangan *overstatement* terhadap laba bersih.

Tidak lama berselang perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang asuransi juga menunjukkan tindakan yang tidak konservatif pada laporan keuangannya. Dilansir dari CNN Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan yang merupakan buntut dari rekayasa laporan keuangan dengan membukukan laba semu (*window dressing*) sejak tahun 2006. Bahkan pada tahun 2017, perusahaan mendapatkan opini tidak wajar dalam laporan keuangannya dikarenakan BPK menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Laba bersih yang dibukukan sebesar Rp 360,3 miliar, namun BPK menilai terdapat kekurangan pencadangan yakni sebesar Rp 7,7 triliun sehingga jika pencadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan maka PT Asuransi Jiwasraya (Persero) seharusnya menderita kerugian (Makki, 2020). Selain kasus pada PT Garuda Indonesia Tbk. dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terdapat

beberapa kasus lain terkait manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN.

**Tabel 1.1**  
**Kasus Manipulasi Laporan Keuangan yang Dilakukan oleh Perusahaan BUMN**

No.	Tahun	Perusahaan	Kasus
1.	2002	PT Kimia Farma (Persero)	Melakukan <i>mark up</i> laba sebesar 24,7% berupa <i>overstated</i> pada penjualan dan persediaan 3 unit usaha (Sandria, 2021).
2.	2006	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Melakukan <i>mark up</i> laba sebesar Rp 6,9 miliar dimana seharusnya perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 63 miliar (Sandria, 2021).
3.	2009	PT Waskita Raya (Persero)	Terdapat kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004-2008 sebesar Rp 400 miliar (Rahadiana, 2009).
4.	2015	PT Timah (Persero)	Menyajikan laporan keuangan fiktif dengan memberikan <i>statement</i> bahwa kinerja perusahaan meningkat pada semester I-2015 dimana seharusnya perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar, penurunan laba dan peningkatan utang hampir 100%. (Sulastri & Anna, 2018)

Banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan BUMN mengindikasikan rendahnya prinsip konservatisme pada laporan keuangan. Pihak manajemen perusahaan tidak berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan, sedangkan prinsip konservatisme dapat mengantisipasi

Riska Mardiani Putri, 2022

**PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba sehingga pengakuan laba yang terlalu tinggi (*overstated*) dapat dicegah. Laba yang disajikan *overstated* lebih berisiko dibandingkan penyajian laba yang *understated* karena risiko tuntutan hukum yang didapat perusahaan akan lebih besar apabila terbukti menyajikan laba *overstated* (Afriani et al, 2021). Dengan digunakannya prinsip konservatisme, kecenderungan membesar-besarkan laba dalam penyajian laporan keuangan dapat dikurangi dengan menerapkan sikap pesimis yang dapat menetralkan sikap optimis manajemen yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan LaFond & Watss (2008) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip konservatisme dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara mencegah manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan.

Penerapan prinsip konservatisme di suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya, *leverage* (Sulastri & Anna, 2018; Ursula & Adhivia, 2018; Hotimah & Retnani, 2018; Putra & Sari, 2020). Faktor kedua yaitu ukuran perusahaan (Ursula & Adhivia, 2018; Hotimah & Retnani, 2018; Andani & Nurhayati, 2021; Hariyanto, 2021). Faktor ketiga yaitu kepemilikan manajerial (Pambudi, 2017; Hotimah & Retnani, 2018; Putra et al, 2019; Hariyanto, 2021). Faktor keempat yaitu *financial distress* (Sulastri & Anna, 2018; Rivandi & Ariska, 2019; Ramadhani & Sulistyowati, 2019; Tazkiya & Sulastiningsih; 2020). Selanjutnya yaitu *growth opportunity* (Andreas et al, 2017; Ursula & Adhivia, 2018; El-Haq et al, 2019; Tazkiya & Sulastiningsih, 2020). Faktor keenam yaitu intensitas modal (Hotimah & Retnani, 2018; Rivandi & Ariska, 2019). Faktor ketujuh yaitu kepemilikan institusional (Putra et al, 2019; El-Haq et al, 2019). Faktor kedelapan yaitu profitabilitas (Andreas et al, 2017; Putra & Sari, 2020; Kalbuana & Yuningsih, 2021; Hariyanto, 2021). Faktor selanjutnya yaitu risiko litigasi (A'isyah & Vestari, 2019; Siswanto & Wijaya, 2021; Andani & Nurhayati, 2021).

Kondisi kesulitan keuangan suatu perusahaan atau *financial distress* merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi penggunaan konservatisme di perusahaan. *Financial distress* merupakan suatu tahapan dimana

Riska Mardiani Putri, 2022

**PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum akhirnya dinyatakan *likuidasi* (Platt & Platt, 2002). Dilansir dari Detik Finance dalam artikelnya Aritonang (2021) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan bahwa kinerja keuangan BUMN yang buruk dapat dilihat dari indeks Altman Z-Score. Terungkap bahwa terdapat 68% BUMN dalam kondisi *distress*, sedangkan 32% BUMN yang lain masih berada di kondisi yang aman. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan kondisi pandemi covid-19 menyebabkan sejumlah BUMN mengalami kesulitan keuangan, hal tersebut karena utang BUMN yang meningkat mencapai Rp 1.682,9 triliun pada tahun 2020 (Pangastuti, 2021).

**Tabel 1.2**  
**Z-Score Perusahaan BUMN**

Kode Emiten	Tahun			
	Z-Score			
	2018	2019	2020	2021
ADHI	2,26	1,73	1,02	0,58
GIAA	-4,36	-3,61	-4,40	-11,56
INAF	0,66	2,50	1,44	1,42
KAEF	2,79	1,33	1,14	1,69
KRAS	-2,62	-6,35	-1,60	-2,20
WSKT	1,56	0,69	-1,59	1,21

Sumber: idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan Z-Score keenam perusahaan BUMN yang cenderung fluktuatif dan berada pada kondisi *financial distress*. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui pada masa pandemi covid-19 yaitu tahun 2020, perusahaan BUMN mengalami penurunan Z-Score yang cukup signifikan bahkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus mengalami penurunan kondisi keuangan dari tahun ke tahun yang dibuktikan dengan angka Z-Score yang negatif. Kondisi *financial distress* dapat mendorong pemegang saham untuk mengganti manajer karena dianggap tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik (Rivandi & Ariska, 2019). Hal tersebut akan



mendorong manajer merubah laba yang merupakan tolak ukur kinerja manajer dalam suatu periode dengan mengatur tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Afriani et al., (2021), Rivandi & Ariska (2019) dan Ramadhani & Sulistyowati (2019) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulastri & Anna (2018) dan Tazkiya & Sulastiningsih (2020) yang menemukan hasil positif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan Haryadi et al., (2020) dan Andani & Nurhayati (2021) menyatakan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Selain *financial distress* terdapat pula faktor lain yang mampu mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi di suatu perusahaan yaitu tingkat utang atau *leverage*. Perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan akan membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang akan mengakibatkan tingkat utang perusahaan menjadi tinggi. Perusahaan yang memiliki kewajiban lebih besar dibandingkan ekuitasnya dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi. Dilansir dari Kompas Bisnis, utang 6 perusahaan BUMN kian membengkak diantaranya PT Waskita Karya memiliki yang DER tertinggi sebesar 359,1% kemudian disusul PT Garuda Indonesia sebesar 211,2% dan PT Adhi Karya sebesar 137,5%. Setelahnya ada PT Kimia Farma sebesar 126,2%, PT Krakatau Steel sebesar 114,2% dan PT Indofarma sebesar 112,4% (Krisjanuar, 2019). Pertumbuhan utang BUMN selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Secara rinci di tahun 2017 sebesar Rp 942,9 triliun kemudian tahun 2018 sebesar Rp 1.251,7 triliun, tahun 2019 tercatat sebesar Rp 1.393,7 triliun dan pada masa pandemi covid-19 utang BUMN mengalami peningkatan 20,7% menjadi Rp 1.682,9 triliun (Pangastuti, 2021).

**Tabel 1.3**  
**Leverage Perusahaan BUMN**

Kode Emiten	Tahun			
	<i>Debt to Equity Ratio</i>			
	2018	2019	2020	2021
ADHI	3,79	4,34	5,83	6,05
GIAA	6,52	6,65	6,55	2,18
INAF	1,90	1,74	2,98	2,96
KAEF	1,73	1,48	1,47	1,46
KRAS	3,40	8,47	6,77	6,23
WSKT	3,31	3,97	7,82	5,70

Sumber: idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa DER perusahaan BUMN cenderung fluktuatif dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan pada PT Adhi Karya, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Waskita Karya menunjukkan angka DER yang tinggi bahkan melebihi ambang batas aman DER dimana tidak lebih dari 3 kali. Dalam teori akuntansi positif, perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan memilih menggunakan prosedur akuntansi dengan menggeser pelaporan laba periode mendatang ke periode sekarang karena semakin tinggi *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Pelaporan laba yang besar akan mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik, dengan demikian perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan cenderung menyajikan laporan keuangan yang tidak konservatif. Penelitian yang dilakukan oleh Ursula & Adhivia (2018), Putra & Sari (2020) dan Hotimah & Retnani (2018) menunjukkan bahwa perusahaan akan menaikkan nilai aset dan pendapatan ketika menginginkan pinjaman yang lebih besar dari kreditur sehingga perusahaan cenderung menyajikan laporan yang tidak konservatif. Namun Sulastri & Anna (2018) dan Afriani et al., (2021) mendapatkan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan Pambudi (2017), Haryadi et al., (2020) dan Kalbuana & Yuningsih (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi dalam suatu perusahaan adalah kepemilikan saham oleh manajer. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu perusahaan. Manajemen sangat berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan perusahaan terutama dalam menentukan pelaporan laba yang optimis ataupun konservatif. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh manajer yang rendah akan bertindak sejalan dengan kepentingannya sebagai *agen* dalam perusahaan sehingga metode yang digunakan perusahaan akan cenderung optimis (Pambudi, 2017). Berdasarkan teori akuntansi positif dalam *bonus plan hypothesis* hal tersebut dikarenakan manajer menginginkan kinerja yang sudah dilakukannya terlihat baik oleh pihak eksternal sehingga mendorong manajer perusahaan melaporkan laba yang tinggi. Pambudi (2017), Putra et al., (2019) dan Hariyanto (2021) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka perusahaan akan cenderung melaporkan laba yang konservatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hotimah & Retnani (2018), A'isyah & Vestari (2019) dan Sari & Siahaan (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ursula & Adhivia (2018), Haniifah et al., (2021) dan El-Haq et al., (2019) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan konservatisme akuntansi.

Selain kepemilikan manajerial, ukuran suatu perusahaan juga merupakan faktor yang mampu mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi dalam suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran atau besarnya sebuah perusahaan yang diukur dari besarnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 terdapat 10 BUMN yang memiliki aset terbesar. Peringkat pertama diduduki oleh PT PLN dengan aset sebesar Rp 1.589 triliun kemudian PT Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah aset Rp 1.416 triliun. Selanjutnya PT Bank Mandiri sebesar Rp 1.318 triliun. Diurutan keempat PT Pertamina sebesar Rp 932,568 triliun dan disusul PT Bank Negara Indonesia sebesar Rp 845,605 triliun (Mutia, 2021). Berdasarkan data

tersebut diketahui bahwa perusahaan-perusahaan BUMN merupakan perusahaan dengan ukuran yang besar karena memiliki nilai aset > 10 miliar rupiah.. Perusahaan dengan ukuran yang besar tergolong memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, oleh karena itu perusahaan besar sering kali menghadapi risiko yang lebih besar pula. Dalam *political cost hyphotesis* pada teori akuntansi positif perusahaan dengan ukuran yang besar lebih rentan terhadap biaya politis. Biaya politis ini muncul karena adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah berkaitan dengan kewajiban membayar pajak sehingga untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, manajemen akan cenderung menyajikan laba yang konservatif. Urusula & Adhivia, Andani & Nurhayati (2021) dan Hotimah & Retnani (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan Ramadhani & Sulistyowati (2019) dan Sinambela & Almilia (2018) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Hingga saat ini, konservatisme akuntansi menjadi topik yang terus diteliti mengingat pentingnya manfaat yang didapat oleh penyaji dan pengguna laporan keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Hasil yang tidak konsisten tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji kembali pengaruh *leverage*, *financial distress*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat konservatisme akuntansi dalam suatu perusahaan sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah keyakinan hasil ada tidaknya pengaruh variabel tersebut terhadap konservatisme akuntansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada populasi dan sampel perusahaan yang digunakan, variabel yang digunakan, periode tahun pengamatan serta dilakukan juga uji beda rata-rata tingkat konservatisme, *leverage*, *financial distress*, kepemilikan manajerial serta ukuran perusahaan sebelum dan selama pandemi covid-19 karena pada masa pandemi covid-19, perusahaan cenderung berada pada keadaan ekonomi dan aktivitas bisnis yang tidak pasti

Riska Mardiani Putri, 2022

**PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga manajer cenderung dituntut untuk membuat keputusan yang lebih hati-hati ditengah ketidakpastian. Peneliti menjadikan perusahaan BUMN sebagai subjek penelitian dilihat dari banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang kerap dilakukan oleh perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang mengindikasikan masih rendahnya prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Leverage*, *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat konservatisme akuntansi, *leverage*, *financial distress*, kepemilikan manajerial serta ukuran perusahaan sebelum dan selama pandemi covid-19.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

Riska Mardiani Putri, 2022

**PENGARUH LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat konservatisme akuntansi, *leverage*, *financial distress*, kepemilikan manajerial serta ukuran perusahaan sebelum dan selama pandemi covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori dibidang ilmu akuntansi mengenai konservatisme akuntansi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian mengenai konservatisme akuntansi.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menggunakan prinsip konservatisme akuntansi dalam perusahaan yang kemungkinan dapat mengurangi masalah keagenan. Bagi investor diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan dengan melihat tingkat konservatisme serta bagi kreditur penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman kepada perusahaan.